Pendapat *Imām Shāfi'ī* ini cukup beralasan, karena berapa pun banyaknya anggota dan kuatnya suatu kelompok tetapi kalau tidak ada pemimpin yang karismatik dan berwibawa maka kelompok tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan. Dengan demikian pengertian kekuatan itu harus berupa gabungan dari unsur personil, senjata, logistik, dan pemimpin yang pandai mengatur taktik dan strategi.

Pemberontakan menurut *Imām Mālik*, *Imām Shāfi'ī*, dan *Imām Aḥmad* dimulai sejak digunakannya kekuatan secara nyata (tahap penghimpunan kekuatan saja) maka pembangkangan itu belum dianggap sebagai pemberontak melainkan tindakan tersebut dikategorikan sebagai *ta'zīr*.

Akan tetapi menurut *Imam Ḥanīfah* mereka itu sudah dianggap sebagai pemberontak karena menurut *Imam Ḥanīfah* pemberontakan itu sudah dimulai sejak mereka berkumpul untuk menghimpun kekuatan dengan maksud untuk berperang dan membangkang terhadap *imām*, bukan menunggu sampai terjadinya penyerangan secara nyata kalau situasinya sudah demikian justru akan lebih sulit untuk mencegah peperangan.

terjadinya pemberontakan, dengan demikian hukuman yang dijatuhkan atas para pemberontak setelah mereka dilumpuhkan dan ditangkap adalah hukuman *ta'zir*.

Hukuman tindak pidana pemberontakan dalam situasi perang adalah diperangi atau ditumpas dengan segala akibat yang timbul, seperti pembunuhan, pelukan, penganiayaan, hanya saja dalam kenyataannya perang atau penumpasan tidak bisa dianggap sebagai hukuman, melainkan suatu upaya represif guna mencegah dan menindas pemberontak serta mengembalikannya kepada sikap taat dan patuh kepada pemerintah yang sah.

Apabila memerangi mereka merupakan hukuman maka tentunya diperbolehkan membunuh pemberontak setelah mereka kalah dalam pertempuran, karena hukuman mereka merupakan balasan atas apa yang dilakukan oleh mereka. Akan tetapi ulama telah sepakat bahwa apabila situasi perang telah selesai maka pertempuran dan pembunuhan harus dihentikan, maka pemberontak harus dijamin keselamatannya karena pemberontakan itulah yang menyebabkan ia kehilangan jaminan keselamatannya.

2) Tidak Berkaitan Langsung dengan Pemberontakan

Adapun tindak pidana yang terjadi pada saat berkecamuknya pertempuran tetapi tidak berkaitan dengan pemberontakan maka dianggap sebagai *jarīmah* biasa dan pelaku perbuatan tersebut dihukum